

Habitus Penerima Program Bantuan Sosial PKH: Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo

Habitus of Recipients of the Family Hope Program (PKH) Social Assistance: A Case Study in Sidoharjo Village

Bintang Suci Maharani

Jurusan Ilmu Sosial Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 25 March 2026

Revised 31 March 2026

Accepted 10 April 2026

Available online 16 April 2026

Keywords: habitus kemiskinan, PKH, bantuan sosial, reproduksi sosial, Bourdieu

Keywords: poverty habitus, PKH, social assistance, social reproduction, Bourdieu



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan serta rendahnya tingkat graduasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang mengindikasikan adanya persoalan tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosial dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana habitus kemiskinan membentuk pola perilaku penerima PKH dalam mengelola bantuan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan perspektif teori habitus Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan cenderung memiliki orientasi survival, menggunakan bantuan untuk kebutuhan jangka pendek, serta mengalami konflik disposisi dalam modal sosial. Habitus kemiskinan juga mereproduksi ketergantungan secara turun-temurun dan mendominasi efektivitas intervensi program. Kesimpulannya, bantuan sosial belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian karena kuatnya pengaruh habitus yang membentuk pola pikir

dan praktik sehari-hari penerima.

ABSTRACT

This study is motivated by the high poverty rate in Pacitan Regency and the low graduation rate of beneficiaries of the Family Hope Program (PKH), indicating problems not only in economic aspects but also in social and cultural dimensions. This research aims to analyze how the habitus of poverty shapes the behavioral patterns of PKH recipients in managing social assistance. The study employs a qualitative approach with a phenomenological method, using in-depth interviews, observation, and documentation techniques. Data analysis is conducted interactively using the habitus theory perspective of Pierre Bourdieu. The results show that beneficiaries tend to have a survival-oriented mindset, use assistance for short-term needs, and experience dispositional conflicts within their social capital. The habitus of poverty also reproduces intergenerational dependency and dominates the effectiveness of program interventions. In conclusion, social assistance has not fully succeeded in fostering independence due to the strong influence of habitus that shapes the recipients' mindset and daily practices.

PENDAHULUAN

Indonesia telah dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah atas sejak 2023, sebuah capaian yang secara makro menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang persisten, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang menghadapi keterbatasan struktural. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 sebesar 9,03%, sementara di Provinsi Jawa Timur mencapai 9,79%. Angka ini menjadi lebih kontras ketika melihat kondisi di Kabupaten Pacitan yang masih berada pada kisaran 13%, jauh

di atas rata-rata nasional. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengangkat seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pacitan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh perbukitan dengan akses infrastruktur yang terbatas, sehingga menghambat mobilitas ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor mata pencaharian utama seperti pertanian dan perikanan tradisional memiliki tingkat produktivitas yang rendah serta sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan, peluang kerja, serta sumber daya ekonomi lainnya. Dalam situasi seperti ini, kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi semata, tetapi berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks dan berlapis.

Sebagai bentuk intervensi, pemerintah menghadirkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Secara kuantitatif, program ini menunjukkan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana program ini mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya ditentukan oleh aspek distribusi bantuan, tetapi juga oleh bagaimana bantuan tersebut dimaknai dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari penerima. Rendahnya angka graduasi penerima bantuan serta kecenderungan jumlah penerima yang tetap stabil bahkan meningkat menjadi indikasi adanya stagnasi sosial-ekonomi. Sebagian besar graduasi yang terjadi pun bersifat alami, seperti karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria administratif, bukan karena keberhasilan peningkatan kesejahteraan. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu memutus rantai kemiskinan.

Fenomena ini semakin menarik ketika dilihat pada konteks Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan. Meskipun wilayah ini memiliki kedekatan dengan pusat kota dan akses yang relatif lebih baik terhadap layanan publik, angka kemandirian penerima bantuan justru masih rendah. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang terus bergantung pada bantuan sosial tanpa menunjukkan perubahan signifikan dalam taraf hidup. Di sisi lain, terdapat kelompok yang secara ekonomi relatif mapan, ditandai dengan kepemilikan aset seperti kendaraan pribadi dan rumah permanen, namun tetap mempertahankan status sebagai penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran sekaligus mengungkap dimensi sosial-budaya yang lebih dalam dalam praktik penerimaan bantuan sosial. Bantuan sosial dalam konteks ini tidak lagi sekadar dipahami sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan, melainkan telah bergeser menjadi sesuatu yang dianggap sebagai hak yang melekat, bahkan sebagai sumber pendapatan tambahan yang rutin. Narasi seperti "selama masih bisa menerima, mengapa harus berhenti" mencerminkan adanya pola pikir pragmatis yang berkembang di masyarakat. Pola ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pengalaman hidup dalam struktur sosial yang mengajarkan sikap adaptif terhadap keterbatasan, sekaligus memproduksi ketergantungan secara berulang.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep habitus, yaitu sistem disposisi yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak individu berdasarkan pengalaman sosial yang dialaminya. Habitus kemiskinan terbentuk dari pengalaman hidup dalam

keterbatasan yang berlangsung secara terus-menerus dan diwariskan antar generasi. Melalui konsep *doxa*, kondisi kemiskinan kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan tidak perlu dipertanyakan. Penerimaan ini secara tidak langsung melemahkan dorongan untuk melakukan perubahan, karena individu cenderung menganggap bahwa posisi sosial yang mereka tempati merupakan bagian dari “takdir” yang sulit diubah. Lebih jauh, keterbatasan dalam kepemilikan berbagai bentuk modal, baik modal ekonomi, sosial, kultural, maupun simbolik semakin mempersempit peluang masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Ketiadaan jaringan sosial yang kuat, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pengakuan sosial membuat individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam kondisi ini, strategi bertahan hidup yang diambil cenderung bersifat jangka pendek, menghindari risiko, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola ini terus direproduksi dalam kehidupan sosial dan menjadi bagian dari struktur yang mempertahankan kemiskinan itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan pendapatan, melainkan juga persoalan cara pandang, nilai, dan praktik sosial yang mengakar. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang hanya berfokus pada distribusi bantuan tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural berpotensi tidak efektif dalam jangka panjang. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai bantuan sosial, serta bagaimana habitus yang terbentuk memengaruhi perilaku mereka dalam merespons program tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan ekonomi dari program bantuan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana habitus kemiskinan terbentuk dan direproduksi, bagaimana penerima Program Keluarga Harapan memaknai bantuan yang mereka terima, serta bagaimana pola pikir dan praktik sosial tersebut berkaitan dengan struktur yang membatasi kemungkinan keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang dimensi sosial-kultural kemiskinan sekaligus menjadi bahan refleksi dalam perumusan kebijakan bantuan sosial yang lebih transformatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi untuk memahami makna perilaku individu atau kelompok secara mendalam dalam konteks alamiah. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh habitus kemiskinan terhadap cara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengelola bantuan sosial secara konkret, khususnya dalam pengambilan keputusan penggunaan dana untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta upaya menuju kemandirian ekonomi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami kesadaran dan pengalaman langsung individu tanpa prasangka, dengan menekankan makna tindakan sosial yang berasal dari motif internal serta pengalaman kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji persepsi, perasaan, dan kesadaran individu dalam memaknai realitas hidup. Ciri utama pendekatan ini meliputi subjektivitas, deskriptif, penggunaan teknik *bracketing* (*epoche*), serta fokus pada penggalan makna pengalaman. Peneliti berinteraksi langsung dengan penerima PKH untuk memahami bagaimana mereka memaknai bantuan sosial, termasuk kebiasaan, nilai, dan pola pikir yang memengaruhi respons terhadap bantuan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori

Habitus Kemiskinan dari Pierre Bourdieu yang menekankan bahwa pola pikir dan perilaku individu dibentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, habitus, kebiasaan, serta modal sosial ekonomi penerima PKH saling memengaruhi, sehingga lingkungan berperan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan program. Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Habitus Kemiskinan

Habitus kemiskinan dalam penelitian ini merupakan hasil pengalaman hidup panjang dalam keterbatasan ekonomi yang membentuk pola pikir dan tindakan penerima PKH melalui interaksi dengan struktur sosial. Habitus ini tidak bersifat bawaan, melainkan terbentuk secara kolektif dan tampak dalam praktik keseharian yang dianggap wajar. Karakteristik utamanya meliputi orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta kecenderungan mempertahankan stabilitas dibandingkan perubahan jangka panjang. Bantuan sosial dipahami sebagai penopang kebutuhan sehari-hari, bukan sebagai instrumen transformasi, sehingga memunculkan ketergantungan yang terinternalisasi (*doxa*). Selain itu, keterbatasan usia, kesehatan, dan peluang ekonomi memperkuat ketergantungan tersebut. Variasi habitus dipengaruhi oleh kondisi individu dan rumah tangga, namun tetap menunjukkan pola umum berupa orientasi survival dan penerimaan terhadap keterbatasan. Pengelolaan bantuan juga bersifat kolektif dalam keluarga sebagai strategi bertahan hidup. Secara keseluruhan, habitus ini membentuk perilaku penerima dalam mengelola bantuan dan berkontribusi pada reproduksi kemiskinan.

Analisis Habitus Kemiskinan dalam Pola Perilaku Penerima PKH

Modal Ekonomi (Habitus Survival)

Modal ekonomi dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar jumlah bantuan, tetapi sebagai kemampuan penerima dalam mengelola dan memaknai sumber daya dalam kondisi keterbatasan. Keterbatasan ekonomi kronis membentuk *taste of necessity* dan habitus penghematan, yang tampak dalam praktik keseharian seperti membawa bekal sendiri serta penggunaan smartphone sebagai alat penting untuk mengakses informasi bantuan. Temuan menunjukkan bahwa habitus survival mendorong penerima memprioritaskan kebutuhan jangka pendek, menjaga stabilitas, dan menghindari risiko, sehingga bantuan PKH lebih difungsikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak daripada sebagai sarana kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan edukatif dalam P2K2 dan evaluasi mekanisme graduasi yang mempertimbangkan aspek sosial serta habitus penerima.

Tabel 1. Analisis Habitus Kemiskinan pada Dimensi Modal Ekonomi

Pola Habitus Ekonomi	Temuan Lapangan pada Penerima (R2-R8)	Perspektif Pendamping (R1)	Makna Analitis
Konsumsi Mendesak (Survival)	R3 (ST): “Kadang-kadang kalo sakit-	Penggunaan dana sering habis untuk kebutuhan harian.	Modal ekonomi berfungsi sebagai penopang

	sakitan ya buat beli obat.”		survival, bukan modal produktif.
Subsidi Penopang Ekonomi Lansia	R6 (TR): Bantuan lansia menjadi penyangga kebutuhan harian meskipun anak bekerja.	Penghentian bantuan sering mengejutkan lansia	Bantuan berdiri sebagai penopang langsung lansia, bukan pelengkap pendapatan keluarga.
Ketergantungan Kronis	R7 (SM): “Ya itung aja dari 24 tahun lalu.”	“Banyak yang dari 2013 masih menerima.”	Bantuan dinormalisasi sebagai sumber daya permanen.
Lemahnya Kontrol Finansial Internal	Kerentanan lansia (R7 SM, R8 SA).	“Cucu ambil Rp600 ribu, nenek cuma dapat Rp200.”	Modal ekonomi tidak sepenuhnya dikuasai penerima utama.

Berdasarkan temuan lapangan, modal ekonomi yang diterima penerima PKH mayoritas mengarahkan modal ekonomi yang diterima untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat langsung dan mendesak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat penerima terbiasa memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan hari ini, bukan pada perencanaan masa depan. Habitus ini terbentuk melalui pengalaman hidup yang panjang dalam kondisi kekurangan, di mana kegagalan memenuhi kebutuhan dasar dapat berdampak langsung pada keberlangsungan hidup. Bantuan sosial dipahami sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan hidup sehari-hari. Hal ini terlihat jelas pada R3 (SR), seorang penerima lansia yang menggunakan bantuan untuk kebutuhan kesehatan. Berikut pernyataannya: *“Kadang-kadang kalo sakit-sakitan ya buat beli obat.”* Dana PKH diposisikan sebagai sumber daya utama untuk menjaga kondisi kesehatan agar tetap mampu bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Pola ini menunjukkan bahwa bantuan sosial dipahami sebagai alat stabilisasi hidup, bukan sebagai modal yang dapat disimpan atau dikembangkan. Hal serupa juga terlihat pada R2 (SU), yang menggunakan dana PKH untuk membantu ayahnya yang kehilangan pendapatan akibat sakit.

“Nggeh mbantu bapak nopo niku” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai penyangga ekonomi rumah tangga ketika sumber pendapatan utama terganggu. Dalam konteks ini, bantuan tidak menciptakan akumulasi modal, melainkan menutup celah ekonomi yang muncul akibat kondisi darurat di mana kegagalan memenuhi kebutuhan dasar dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup. Dalam analisis habitus, pola ini menunjukkan adanya disposisi survival jangka pendek yang kuat. Modal ekonomi tidak pernah berada dalam kondisi “bebas” untuk dialokasikan ke tujuan produktif karena selalu terserap oleh kebutuhan mendesak. Akibatnya, penerima tidak memiliki ruang untuk membangun strategi ekonomi jangka panjang.

Modal ekonomi dalam bentuk bantuan sosial juga berperan sebagai penopang ekonomi langsung bagi kelompok lansia. Bantuan tidak selalu berfungsi sebagai pelengkap pendapatan keluarga, melainkan berdiri sebagai sumber daya tersendiri yang menopang kebutuhan lansia secara langsung. Kondisi ini terlihat pada R6 (TR), yang selama bertahun-tahun menerima bantuan lansia. Meskipun anak subjek telah magang di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan kemudian diangkat sebagai PPPK, bantuan sosial tetap memiliki fungsi tersendiri dalam menopang kebutuhan lansia. Ketika bantuan tersebut dihentikan akibat perubahan status administratif anak yang masih tercatat dalam satu Kartu

Keluarga, subjek merasakan kehilangan penyangga ekonomi yang selama ini menjaga stabilitas hidupnya. Kondisi yang dialami TR merupakan indikasi dari efek Hysteresis, yaitu kondisi di mana habitus (mentalitas) seseorang tertinggal dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan struktur atau posisi kelas yang baru. Meskipun secara objektif kondisi ekonomi keluarga TR meningkat (anak menjadi PPPK), namun habitus kemiskinannya masih melekat kuat. Hal ini disebabkan karena *Capital Volume* (Total Volume Modal) yang dimiliki informan selama puluhan tahun berada dalam level rendah, sehingga 'kompas internalnya' masih berorientasi pada perlindungan negara dan sulit untuk langsung beralih ke mentalitas kemandirian.

Pernyataan subjek semakin menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak menggantikan pendapatan anak, melainkan berfungsi sebagai subsidi struktural yang menopang kebutuhan lansia secara langsung. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa dalam rumah tangga lansia, modal ekonomi dari bantuan sosial memiliki posisi yang sangat penting. Penghentian bantuan tidak dipersepsikan sebagai penyesuaian administratif yang wajar, melainkan sebagai kehilangan sumber penopang yang selama ini dianggap bagian dari keteraturan hidup sehari-hari.

Habitus kemiskinan dalam dimensi modal ekonomi juga ditandai oleh ketergantungan yang bersifat kronis dan dinormalisasi. Ketergantungan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui pengalaman hidup dalam kemiskinan yang berlangsung lintas waktu. R7 (SM) menjadi contoh yang sangat kuat dalam menggambarkan kondisi ini. Ketika menyatakan:

"Ya itung aja dari 24 tahun lalu,"

Pernyataan ini tidak hanya merujuk pada durasi penerimaan PKH, tetapi pada sejarah panjang kemiskinan keluarganya sejak ayahnya mengalami disabilitas. Bantuan sosial hadir sebagai penopang utama kehidupan keluarga dan dipahami sebagai bagian dari keteraturan hidup. Pandangan ini diperkuat oleh R1 (K) selaku pendamping PKH yang menyatakan bahwa banyak penerima telah menerima bantuan sejak awal program:

"Banyak yang dari 2013 masih menerima."

Pendamping juga menekankan bahwa perubahan pola pikir penerima merupakan tantangan terbesar dalam pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa habitus ketergantungan telah mengakar kuat dan tidak mudah diubah hanya melalui intervensi program. Ketergantungan ini mencerminkan adaptasi rasional terhadap kondisi struktural yang tidak menyediakan alternatif ekonomi yang realistis. Dalam situasi tersebut, bantuan sosial dipersepsikan sebagai fondasi yang menopang kehidupan sehari-hari

Dimensi lain dari habitus survival pada modal ekonomi adalah lemahnya kontrol finansial internal, terutama pada rumah tangga lansia. Keterbatasan fisik dan posisi sosial yang lemah membuat lansia sering kali tidak memiliki kuasa penuh atas bantuan yang diterimanya. R1 (K) mengungkapkan fenomena ini secara jelas:

"Banyak kasus pengambilan uang oleh anggota keluarga lain, terutama cucu yang mengambil Rp600 ribu dan hanya memberikan Rp200 ke neneknya."

Kondisi ini relevan dengan situasi R8 (SA) yang sudah lanjut usia dan tidak mampu mengelola bantuan secara mandiri. Modal ekonomi yang diterima tidak sepenuhnya dikuasai oleh penerima utama, melainkan dikelola oleh anggota keluarga lain yang dinilai lebih mampu. Secara keseluruhan, analisis modal ekonomi menunjukkan bahwa habitus kemiskinan bekerja melalui orientasi survival jangka pendek, posisi bantuan sebagai penopang ekonomi lansia, normalisasi ketergantungan struktural, serta lemahnya kontrol finansial internal dalam rumah tangga. Bantuan sosial berfungsi

sebagai alat stabilisasi kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sarana transformasi ekonomi jangka panjang. Kesenjangan antara tujuan normatif Program Keluarga Harapan (PKH) dan praktik pengelolaan dana di tingkat rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari habitus kemiskinan yang telah terbentuk secara lama dan berulang. Subbab ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana keterbatasan modal ekonomi kemudian berkontrol dengan modal sosial dan relasi keluarga, yang akan dibahas pada subbab berikutnya mengenai konflik disposisi.

Disarankan agar pendamping PKH memperkuat pendekatan edukatif dalam kegiatan P2K2, tidak hanya sebagai forum formal, tetapi sebagai ruang refleksi bagi penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme graduasi agar lebih mempertimbangkan aspek sosial dan habitus penerima bantuan.

Modal Sosial (Konflik Disposisi)

Modal sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai jaringan, dukungan informal, dan bantuan non-material yang dimanfaatkan penerima dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya cenderung sebagai mekanisme adaptif untuk mempertahankan akses terhadap bantuan, bukan sebagai pendorong kemandirian ekonomi, sejalan dengan habitus kemiskinan yang membentuk pemanfaatan relasi secara pragmatis. Modal sosial juga diperkuat oleh modal budaya berupa kesantunan (bahasa dan etika Jawa) yang digunakan untuk menjaga martabat simbolik dan memperlancar relasi dengan pihak pendamping maupun birokrasi. Namun, temuan menunjukkan bahwa modal sosial kerap menjadi arena konflik antara tuntutan administratif program dan kondisi objektif penerima. Dalam situasi ini, modal sosial lebih dimanfaatkan untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan, bukan untuk mendorong perubahan yang bersifat transformatif.

Modal sosial berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu merupakan sumber daya yang tertanam dalam jaringan relasi yang relatif stabil dan dapat dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Namun, dalam konteks kemiskinan struktural, modal sosial tidak selalu bekerja secara akumulatif. Modal sosial justru sering dimanfaatkan untuk mempertahankan posisi yang ada, bukan untuk mentransformasikannya. Hal inilah yang tampak pada penerima PKH, di mana relasi sosial lebih berfungsi sebagai alat adaptasi agar tetap bertahan dalam keterbatasan, bukan sebagai sarana mobilitas sosial. Salah satu bentuk pemanfaatan modal sosial yang menonjol adalah penggunaan jaringan sosial untuk menjaga kepatuhan minimal terhadap program. R3 (ST), seorang penerima lansia dengan keterbatasan fisik dan mobilitas, menunjukkan upaya aktif untuk tetap hadir dalam kegiatan pendampingan dengan memanfaatkan bantuan orang lain. Hal ini terlihat dari pernyataannya, *"Kulo?...niki kalih Mba Sri dijemput."*

Disarankan agar pendamping PKH memperkuat pendekatan edukatif dalam P2K2 sebagai ruang refleksi, serta pemerintah daerah melakukan evaluasi mekanisme graduasi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan habitus penerima. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi penerima sering bergantung pada dukungan modal sosial, terutama dalam kondisi keterbatasan fisik, sehingga kehadiran dalam program lebih bersifat strategis untuk mempertahankan bantuan daripada partisipasi substantif. Modal sosial juga berfungsi sebagai penopang akses bantuan, baik melalui jaringan sosial maupun dukungan keluarga, namun sekaligus dapat memperkuat ketergantungan dan membatasi kontrol penerima utama. Selain itu, modal sosial dapat berubah menjadi sumber kerentanan ketika berbenturan dengan aturan administratif, seperti perubahan

status keluarga yang menyebabkan penghentian bantuan. Pada kelompok rentan, modal sosial cenderung bersifat protektif pasif yang menjaga stabilitas, bukan mendorong pemberdayaan. Secara umum, pemanfaatan modal sosial masih bersifat adaptif dan minimal, dengan kepatuhan yang cenderung simbolik serta variasi sikap penerima terhadap status bantuan.

Tabel 2. Analisis Habitus Kemiskinan pada Dimensi Modal Sosial (Konflik Disposisi)

Pola Modal Sosial	Temuan Lapangan pada Penerima (R2-R8)	Perspektif Pendamping (R1)	Makna Analisis
Pemanfaatan jaringan untuk kepatuhan	R3 (ST): “Kulo?...niki kalih Mba Sri dijemput.”	Kehadiran lansia bergantung pada bantuan orang lain	Modal sosial sebagai alat adaptasi untuk kepatuhan minimal
Ketergantungan keluarga inti	R7 (SM): mewakili ayah lansia disabilitas	Banyak lansia tidak mengurus bantuan secara mandiri	Modal sosial memperkuat ketergantungan
Konflik relasi keluarga-administrasi	R6 (TR): perubahan status anak memengaruhi bantuan	Administrasi KK menentukan status kepesertaan	Modal sosial dapat menjadi sumber kerentanan
Kepatuhan simbolik	Kehadiran menjaga status penerima	P2K2 dipersepsikan sebagai formalitas	Modal sosial memenuhi tuntutan administratif
Normalisasi status penerima	Penerima menganggap bantuan sebagai hal biasa	Ada yang malu, banyak yang sudah biasa	Modal sosial menormalisasi ketergantungan
	R8 (SA): keterbatasan komunikasi	Lansia sulit aktif tanpa pendampingan	Modal sosial bersifat protektif namun pasif

Tabel diatas memperlihatkan bahwa modal sosial pada penerima PKH tidak bekerja sebagai sumber daya yang netral atau selalu memberdayakan, melainkan beroperasi secara ambivalen dalam kerangka habitus kemiskinan. Modal sosial, berupa jaringan keluarga, tetangga, maupun relasi antar sesama penerima, digunakan terutama sebagai alat adaptasi untuk mempertahankan akses terhadap bantuan sosial dan memenuhi tuntutan program dalam situasi keterbatasan fisik, ekonomi, dan administratif. Di sisi lain, jaringan yang sama justru memperkuat ketergantungan, kepatuhan simbolik, dan normalisasi status sebagai penerima bantuan. Dengan kata lain, alih-alih menjadi jalan keluar dari kemiskinan, modal sosial lebih sering berfungsi sebagai mekanisme yang menyesuaikan individu dengan struktur kemiskinan yang sudah ada. Inilah yang kemudian menjembatani analisis menuju subbab berikutnya tentang Reproduksi Kemiskinan, karena relasi sosial yang bersifat adaptif ini menjadi salah satu medium utama di mana habitus kemiskinan terus direproduksi dari waktu ke waktu dan lintas generasi.

Analisis Reproduksi Kemiskinan (Habitus Dominan)

Reproduksi Kemiskinan melalui Praktik Sehari-hari (Habitus Survival yang Berulang)

Praktik sosial menurut perspektif Pierre Bourdieu merupakan hasil dari interaksi antara struktur objektif dan disposisi subjektif (*habitus*) yang telah terinternalisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kemiskinan dalam penelitian ini tidak dipahami semata sebagai kondisi ekonomi, melainkan sebagai pola hidup yang dijalani, diterima, dan direproduksi melalui rutinitas keseharian penerima bantuan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima PKH menjalankan kehidupan sehari-hari dengan orientasi utama pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Bantuan sosial yang diterima lebih sering dimaknai sebagai penyangga hidup dibandingkan sebagai instrumen perubahan kondisi sosial-ekonomi. Pola ini terlihat konsisten lintas informan penerima, terutama pada kelompok lansia, rumah tangga dengan keterbatasan fisik, serta keluarga dengan sumber pendapatan yang tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, praktik hidup sehari-hari dibentuk oleh logika untuk bertahan hidup. R3 (ST) dan R8 (SA), yang termasuk kategori lansia, menunjukkan bagaimana *habitus survival* bekerja secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan berfokus pada kestabilan minimum, seperti cukup makan, tidak sakit, dan tetap terdaftar sebagai penerima bantuan. Bantuan PKH tidak dipersepsikan sebagai peluang untuk mengubah kondisi hidup, melainkan sebagai bagian dari keseharian yang “memang sudah begitu”. Orientasi ini memperlihatkan bagaimana struktur kemiskinan yang berlangsung lama telah membentuk disposisi yang cenderung menghindari risiko dan perubahan.

Pendamping PKH, R1 (K) sebagai informan kunci menegaskan bahwa pola pemanfaatan bantuan oleh penerima cenderung bersifat konsumtif dan berulang. Bantuan digunakan untuk kebutuhan harian seperti pangan, biaya kesehatan ringan, dan kebutuhan rumah tangga dasar. Jarang ditemukan penerima yang secara konsisten mengalokasikan bantuan untuk tujuan produktif atau investasi jangka panjang. Menurut pendapatnya, kondisi seperti ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program, melainkan karena penerima telah lama terbiasa hidup dalam situasi kekurangan yang menuntut keputusan cepat, pragmatis, dan berorientasi pada kelangsungan hidup. Dalam kerangka teori Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan dominasi *habitus kemiskinan* atas kemungkinan perubahan yang ditawarkan oleh program bantuan sosial. *Habitus survival* membimbing tindakan penerima secara praktis tanpa memerlukan refleksi sadar, sehingga pilihan-pilihan hidup yang diambil tampak rasional bagi penerima, tetapi secara struktural justru mempertahankan posisi mereka dalam kemiskinan. Dalam hal ini, bantuan sosial cenderung menyesuaikan diri dengan *habitus* penerima, bukan sebaliknya. Reproduksi kemiskinan melalui praktik sehari-hari juga terlihat dalam pengambilan keputusan keluarga terkait pendidikan dan kesehatan.

Keterangan dari anak R5 (SA) menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan kebutuhan ekonomi saat ini dibandingkan investasi jangka panjang, khususnya pendidikan. Pendidikan dipahami sebatas kewajiban formal, bukan sebagai modal budaya yang dapat meningkatkan peluang mobilitas sosial di masa depan. Walaupun sudah diberikan jaminan dengan adanya KIP untuk lanjut ke jenjang Perguruan Tinggi namun tetap menolak. Keengganan anak SA untuk memanfaatkan peluang pendidikan tinggi adalah bentuk nyata dari Reproduksi Sosial. Hal ini terjadi karena rendahnya Modal Budaya yang terakumulasi dalam lingkungan keluarga miskin. *Habitus kemiskinan* membuat individu cenderung membatasi diri pada 'cakrawala harapan' yang rendah. Mereka merasa bahwa pendidikan tinggi bukanlah ranah yang ditujukan bagi kelas mereka,

sehingga mereka lebih memilih untuk mereproduksi pola hidup orang tua mereka dengan bekerja di sektor informal. Di sinilah habitus bekerja sebagai struktur yang membelenggu mobilitas sosial antar generasi. Saat kondisi seperti ini juga diperkuat dengan oleh normalisasi kondisi miskin dalam kehidupan sehari-hari maka kemiskinan tidak lagi dipersepsikan sebagai situasi sementara yang harus diatasi, melainkan sebagai realitas hidup yang harus diterima. Untuk memperjelas pola reproduksi kemiskinan yang berlangsung melalui praktik sehari-hari tersebut, berikut disajikan ringkasan temuan lapangan dalam bentuk tabel analisis

Tabel 3. Reproduksi Kemiskinan melalui Praktik Sehari-hari (Habitus Survival)

Aspek Praktik	Temuan Lapangan	Pola Reproduksi	Makna Toeritis
Pemanfaatan Bantuan	Bantuan digunakan untuk kebutuhan harian (pangan, obat, kebutuhan dasar).	Pola konsumsi berulang.	Dominasi orientasi survival.
Orientasi Waktu	Fokus pada pemenuhan kebutuhan hari ini.	Minim perencanaan jangka panjang.	Habitus masa kini.
Pendidikan	Pendidikan dipahami sebatas kewajiban formal.	Rendah investasi modal budaya.	Reproduksi simbolik.
Sikap terhadap Risiko	Menghindari perubahan ekonomi.	Pola hidup stagnan.	Stabilitas lebih penting dari mobilitas.
Fungsi Bantuan	Penyangga hidup minimum.	Ketergantungan berulang.	Stabilisasi bukan transformasi.

Temuan menunjukkan bahwa praktik sehari-hari penerima PKH membentuk habitus survival yang konsisten, ditandai oleh penggunaan bantuan untuk kebutuhan dasar, orientasi jangka pendek, dan rendahnya investasi modal budaya. Pola ini membuat bantuan sosial lebih berfungsi sebagai penstabil kehidupan daripada pendorong perubahan, sehingga penerima cenderung mempertahankan kondisi minimum dan memaknai bantuan sebagai bagian dari mekanisme adaptasi hidup. Habitus ini juga membentuk harapan masa depan yang realistis dan terbatas, dengan fokus pada stabilitas jangka pendek dibanding mobilitas sosial. Kepatuhan terhadap program cenderung bersifat prosedural dan simbolik, mencerminkan adanya symbolic violence di mana penerima menerima posisi sebagai kelompok miskin demi akses bantuan. Dengan demikian, reproduksi kemiskinan terjadi sebagai hasil interaksi antara struktur sosial dan praktik keseharian, bukan semata kegagalan individu. Pola ini memperkuat stagnasi sosial dan diwariskan dalam keluarga, sehingga analisis kemiskinan perlu mencakup dimensi kultural selain ekonomi.

Reproduksi Kemiskinan melalui Relasi Keluarga dan Lintas Generasi

Dalam perspektif Bourdieu, keluarga merupakan arena utama pembentukan habitus yang mentransmisikan bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga disposisi, cara berpikir, dan

orientasi hidup. Pada penerima PKH, bantuan sosial terintegrasi dalam strategi bertahan hidup keluarga dan dimediasi oleh relasi internal, termasuk pembagian peran lintas generasi. Temuan menunjukkan adanya transfer beban struktural, di mana anggota keluarga yang lebih mampu mengambil alih pengelolaan bantuan, serta potensi kerentanan akibat aturan administratif yang tidak sensitif terhadap kondisi keluarga. Anak-anak dalam keluarga penerima cenderung mewarisi orientasi survival dengan ekspektasi terbatas, sehingga pendidikan dan mobilitas sosial kurang dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, distribusi bantuan dalam keluarga dapat menciptakan relasi kuasa internal dan ketergantungan. Secara keseluruhan, keluarga berperan sebagai mekanisme reproduksi kemiskinan melalui keterbatasan modal ekonomi, sosial, dan budaya yang diwariskan antar generasi. PKH berfungsi sebagai penyangga kehidupan, namun belum mampu memutus reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Tabel 4. Reproduksi Kemiskinan melalui Relasi Keluarga dan Lintas Generasi

Pola Reproduksi	Informan	Temuan Lapangan (Kutipan)	Makna Analisis
Transfer beban ekonomi antar generasi	R7 (SM)	"Cuma saya mewakili bapak."	Anak menjadi penopang utama lansia disabilitas
Ketergantungan jangka panjang	R7 (SM)	"Bapak disabilitas 24 tahun kerubuhan..."	Kemiskinan dan disabilitas membentuk ketergantungan lintas waktu
Bantuan sebagai substitusi peran keluarga	R7 (SM)	"Dari 2014... ikut BPNT, PKH terus dapat BLTS."	Negara menggantikan sebagian fungsi ekonomi keluarga
Relasi keluarga memengaruhi akses bansos	R6 (TR)	Anak PPPK → bantuan lansia dihentikan	Status anak menentukan nasib orang tua
Normalisasi ketergantungan lintas generasi	R1 (K)	"Banyak yang dari 2013 masih menerima."	Ketergantungan berlangsung lintas generasi
Kesulitan memutus pola	R1 (K)	"Merubah mereka sadar sudah tidak layak bansos itu effort luar biasa."	Habitus kemiskinan diwariskan dan mengakar

Temuan yang dirangkum dalam tabel diatas tidak hanya merangkum variasi relasi keluarga, tetapi menunjukkan bahwa kemiskinan direproduksi melalui jaringan relasi sosial yang kompleks di dalam rumah tangga penerima PKH. Relasi antara orang tua dan anak, lansia dan keluarga, serta antara keluarga dan negara menunjukkan bagaimana bantuan sosial, alih-alih sepenuhnya membebaskan keluarga dari kemiskinan, justru terintegrasi ke dalam struktur relasi yang telah lama terbentuk dalam rumah tangga miskin. Sedangkan bantuan sosial beroperasi lebih sebagai

mekanisme stabilisasi sosial daripada sebagai alat mobilitas. Pola-pola inilah yang kemudian mengarah pada terbentuknya habitus dominan kemiskinan.

Dominasi Habitus Kemiskinan atas Intervensi Program

Intervensi program menurut Pierre Bourdieu merupakan bentuk struktur objektif yang berupaya mengarahkan praktik sosial penerima. Namun, struktur tersebut tidak bekerja dalam ruang kosong, melainkan masuk ke dalam medan sosial yang telah lama dibentuk oleh disposisi, pengalaman hidup, dan strategi bertahan yang terinternalisasi dalam diri penerima. Dalam konteks ini, PKH hadir membawa logika rasional birokratis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perubahan perilaku. Akan tetapi, logika tersebut berhadapan langsung dengan habitus survival yang telah terbentuk selama bertahun-tahun di tengah kondisi kemiskinan. Habitus ini tidak sekadar kebiasaan, tetapi merupakan cara berpikir, merasa, dan bertindak yang telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari penerima. Akibatnya, ketika intervensi program masuk, ia tidak otomatis mengubah orientasi hidup penerima, melainkan cenderung diserap dan disesuaikan dengan pola lama. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima PKH memahami program terutama sebagai sumber tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Bantuan yang didapatkan lebih dimaknai sebagai “Uang bantuan” daripada sebagai instrumen perubahan sosial. R2 (SU) dan R5 (SA), misalnya, memprioritaskan penggunaan bantuan untuk kebutuhan harian seperti makan, obat, atau keperluan rumah tangga. Praktik ini bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan refleksi dari logika hidup yang dibentuk oleh keterbatasan ekonomi kronis. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar sering kali belum terpenuhi, orientasi jangka pendek menjadi rasional menurut habitus mereka.

Pendamping PKH, R1 (K) menegaskan bahwa meskipun program secara formal mendorong perubahan perilaku dan kemandirian, dalam praktiknya penerima lebih fokus pada keberlanjutan bantuan. Menurut keterangannya, banyak penerima hadir dalam kegiatan pendampingan dan memenuhi kewajiban administratif bukan karena dorongan untuk bertransformasi, tetapi agar tetap terdaftar sebagai penerima. Ini menunjukkan bahwa intervensi program justru masuk ke dalam logika bertahan hidup penerima, di mana kepatuhan menjadi strategi untuk menjaga aliran bantuan. Dalam perspektif Bourdieu, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *hysteresis effect*, yaitu keterlambatan perubahan habitus ketika struktur sosial berubah. Program PKH membawa perubahan struktur berupa peluang peningkatan kesejahteraan, tetapi habitus penerima belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Sebaliknya, struktur program justru lebih banyak menyesuaikan diri dengan habitus yang ada. Kegiatan pendampingan, misalnya, sering kali berakhir menjadi rutinitas administratif yang diikuti tanpa internalisasi makna. Dengan demikian, praktik yang dihasilkan tetap berada dalam orbit lama kemiskinan.

Dominasi habitus kemiskinan juga terlihat dalam cara penerima memaknai kewajiban program. Sekolah dan kesehatan dipahami sebagai syarat agar bantuan tidak dicabut, bukan sebagai investasi sosial jangka panjang. R4 (KD) dan R7 (SM) menunjukkan bahwa selama kewajiban minimum terpenuhi, tidak ada dorongan kuat untuk melampaui standar yang ditetapkan. Pendidikan anak dan cucu dipenuhi secara formal, tetapi tidak disertai dengan harapan mobilitas sosial yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa intervensi program bekerja dalam batas-batas yang ditentukan oleh habitus penerima. Lebih jauh, dominasi habitus juga tampak dalam relasi penerima dengan pendamping dan birokrasi. Penerima cenderung bersikap pasif, menerima instruksi, dan

menghindari konflik, bukan karena kesadaran kritis, tetapi karena pengalaman panjang berhadapan dengan institusi negara yang bersifat hierarkis. Habitus subordinasi ini membuat penerima lebih fokus pada kepatuhan daripada partisipasi aktif. Akibatnya, potensi program untuk memberdayakan sering kali tereduksi menjadi sekadar mekanisme distribusi bantuan. Dalam konteks ini, PKH berfungsi lebih sebagai alat stabilisasi sosial dibandingkan sebagai sarana transformasi struktural. Bantuan memang mengurangi kerentanan ekstrem dan mencegah kondisi menjadi lebih buruk, tetapi tidak cukup kuat untuk menggoyahkan habitus kemiskinan yang telah mengakar.

Disarankan agar pendamping PKH memperkuat pendekatan edukatif dalam kegiatan P2K2, tidak hanya sebagai forum formal, tetapi sebagai ruang refleksi bagi penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme graduasi agar lebih mempertimbangkan aspek sosial dan habitus penerima bantuan.

Tabel 5. Dominasi Habitus Kemiskinan atas Intervensi Program PKH

Dimensi Intervensi Program	Temuan pada Penerima (R2-R8)	Perspektif Pendamping (R1-K)	Pola Dominasi Habitus	Makna Teoritis (Bourdieu)
Tujuan Program	Bantuan dipahami sebagai uang untuk kebutuhan sehari-hari (makan, obat, rumah tangga).	Penerima lebih fokus agar bantuan tetap cair daripada perubahan jangka panjang.	Program ditarik ke dalam logika survival.	Habitus menentukan makna objektif program.
kewajiban Pendidikan dan Kesehatan	Dipenuhi sebagai syarat administratif, bukan sebagai investasi masa depan.	Banyak penerima hadir sekadar agar tidak dicoret dari kepesertaan.	Kepatuhan simbolik.	Praktik mengikuti struktur tanpa internalisasi makna.
Pertemuan P2K2 dan Pendampingan	Hadir rutin, tetapi pemahaman terhadap tujuan rendah.	P2K2 sering menjadi rutinitas formal.	Rutinisasi tanpa transformasi.	Habitus lama menyerap struktur baru.
Pengelolaan Bantuan	Bantuan langsung habis untuk kebutuhan harian.	Jarang ditemukan alokasi produktif.	Orientasi jangka pendek.	Dominasi habitus masa kini (present-oriented habitus).

Relasi dengan Negara	Penerima cenderung pasif dan patuh.	Takut salah, takut dicoret.	Subordinasi simbolik.	Internalized domination.
Orientasi Keluar dari Program (Graduasi)	Banyak tidak punya target keluar.	Sebagian ingin tetap terdaftar selama mungkin.	Ketergantungan struktural.	Reproduksi posisi sosial dalam medan.
Respon terhadap Perubahan	Menghindari risiko dan ketidakpastian.	Perubahan sering ditolak secara halus.	Stabilitas lebih penting dari mobilitas.	Habitus survival.

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun PKH dirancang sebagai intervensi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi, dalam praktiknya intervensi tersebut justru dibingkai ulang oleh penerima melalui lensa habitus kemiskinan yang telah mengakar. Bantuan sosial tidak diterjemahkan sebagai peluang mobilitas sosial, melainkan sebagai bagian dari strategi bertahan hidup sehari-hari. Hal ini terlihat dari dominannya orientasi konsumtif jangka pendek dan kepatuhan administratif simbolik dalam memenuhi kewajiban program. Dapat disimpulkan bahwa dominasi habitus kemiskinan atas intervensi PKH bukan berarti program gagal secara teknis, melainkan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara struktur kebijakan dan disposisi sosial penerima. Program menyediakan peluang objektif, tetapi habitus membatasi bagaimana peluang tersebut diinterpretasikan dan digunakan. Situasi inilah yang menjelaskan mengapa bantuan sosial cenderung menstabilkan kemiskinan daripada mentransformasikannya, dan menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan lanjutan tentang reproduksi kemiskinan lintas generasi.

Pengaruh Habitus Kemiskinan terhadap Pengelolaan Bantuan Sosial Pola Pemanfaatan Bantuan dalam Kerangka Habitus Sosial

Kerangka habitus sosial merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman hidup panjang dalam kemiskinan, ketidakpastian, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, tindakan individu tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan rasional yang bebas, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara kondisi objektif (struktur sosial, posisi kelas, keterbatasan material) dan disposisi subjektif (habitus) yang terinternalisasi secara perlahan dan berulang. Oleh karena itu, cara penerima PKH menggunakan bantuan sosial mencerminkan bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga cara mereka memahami dunia, masa depan, dan kemungkinan perubahan dalam hidupnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bagi sebagian besar penerima tidak dimaknai sebagai “modal” untuk bergerak keluar dari kemiskinan, melainkan sebagai sumber daya yang berfungsi menjaga keberlangsungan hidup minimum. Bantuan diposisikan sebagai penyangga kehidupan sehari-hari (*Buffer survival*), yang memungkinkan rumah tangga tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan kerja. Dalam kondisi ini, penggunaan bantuan sangat terikat pada kebutuhan yang

bersifat langsung, seperti pangan, obat-obatan, biaya listrik, kebutuhan sekolah dasar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Orientasi seperti ini mencerminkan logika survival yang telah lama tertanam dalam habitus kemiskinan.

R3 (ST), seorang lansia dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil, menggambarkan orientasi ini ketika menyatakan bahwa dana PKH sering digunakan untuk membeli obat ketika tubuhnya sakit. Bagi beliau, bantuan sosial tidak hadir sebagai ruang pilihan yang fleksibel, melainkan sebagai alat untuk memastikan bahwa tubuhnya tetap sehat dan mampu menjalani rutinitas sehari-hari. Dalam kondisi ini, kesehatan menjadi prioritas absolut karena tanpa kesehatan, tidak ada kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Pola ini menunjukkan bagaimana habitus survival mengarahkan bantuan sosial langsung ke kebutuhan yang dianggap paling mendesak dan paling menentukan kelangsungan hidup. Hal serupa terlihat pada R8 (SA), yang juga termasuk kelompok lansia dengan keterbatasan komunikasi dan fisik. Bagi Sami, bantuan PKH telah menjadi bagian dari ritme hidup yang nyaris rutin. Bantuan datang, digunakan untuk kebutuhan dasar, lalu habis sebelum periode berikutnya. Tidak terdapat pemisahan antara “uang bantuan” dan “uang untuk hidup” keduanya menyatu dalam satu siklus survival. Pola ini menunjukkan bahwa bantuan sosial telah terintegrasi ke dalam struktur praktik keseharian, bukan sebagai sumber daya yang dapat dinegosiasikan untuk strategi jangka panjang.

R1 (K), sebagai pendamping PKH menegaskan bahwa pola seperti ini dominan di lapangan. Menurutnya, sebagian besar penerima PKH menggunakan bantuan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif dan jarang sekali mengalokasikannya untuk kegiatan produktif atau tabungan. R1 (K) menekankan bahwa kondisi ini bukan semata-mata karena kurangnya pemahaman, tetapi karena penerima telah terbiasa hidup dalam situasi di mana setiap rupiah harus segera dikonversi menjadi kebutuhan nyata. Berada dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang kronis, menunda konsumsi demi masa depan justru terasa lebih berisiko. Dalam kerangka Bourdieu, situasi seperti ini mencerminkan bagaimana struktur kemiskinan yang berlangsung lama telah membentuk habitus yang berorientasi pada masa kini (*Present-oriented habitus*). Masa depan dipersepsikan sebagai pilihan tidak pasti, bahkan tidak dapat diandalkan, maka tindakan yang paling masuk akal adalah memaksimalkan keamanan hari ini. Habitus survival ini membuat penerima cenderung menghindari strategi yang membutuhkan penundaan kepuasan atau pengambilan risiko, seperti investasi usaha kecil atau pengembangan keterampilan. Lebih jauh, bantuan sosial PKH justru beroperasi dalam ruang yang telah dibentuk oleh habitus tersebut. Meskipun program ini dirancang dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemandirian, tetapi ketika masuk ke dalam dunia sosial penerima yang telah memiliki logika sendiri tentang bagaimana sumber daya harus digunakan maka alih-alih mengubah logika itu, bantuan sering kali diserap dan disesuaikan dengan pola hidup yang sudah ada. Akibatnya, bantuan sosial tidak menghasilkan perubahan struktur praktik, tetapi justru memperkuat ritme survival yang sudah berlangsung lama.

Pola pemanfaatan bantuan pada tingkat rumah tangga juga tampak dalam cara keluarga mengatur pengeluaran. R4 (KD) dan R7 (SM), misalnya, menunjukkan bahwa keluarga menyesuaikan kebutuhan hidup dengan siklus pencairan bantuan. Pengeluaran dirancang agar “cukup sampai bantuan berikutnya,” bukan untuk membangun cadangan atau modal ekonomi. R1 (K) sebagai pendamping menjelaskan bahwa ketika terdapat dorongan untuk menggunakan bantuan secara produktif, disposisi penerima sering kali tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Beberapa penerima mungkin mencoba, tetapi ketika menghadapi risiko kecil saja, seperti usaha tidak laku atau

kebutuhan mendadak maka mereka akan kembali pada pola konsumsi survival. Ini menunjukkan bahwa perubahan praktik ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perubahan disposisi yang lebih dalam. Bantuan sosial tidak menjadi titik awal perencanaan ekonomi jangka panjang, melainkan menjadi penopang sementara dalam siklus ketidakpastian yang terus berulang. Habitus survival juga tercermin pada rendahnya ekspektasi terhadap perubahan. Banyak penerima yang tidak membayangkan dirinya akan benar-benar keluar dari kemiskinan, sehingga bantuan sosial lebih dipersepsikan sebagai sesuatu yang “pantas” dan “wajar” diterima.

Banyak penerima yang menganggap bantuan sosial sebagai intervensi sementara, tetapi sebagai bagian dari keteraturan hidup. Hal inilah yang menjelaskan meskipun secara formal terdapat mekanisme graduasi mandiri, namun secara praktis banyak penerima tidak memiliki orientasi untuk keluar dari program. Situasi seperti ini menurut perspektif Bourdieu seakan menunjukkan PKH beroperasi lebih sebagai mekanisme stabilisasi daripada sebagai alat transformasi. Bantuan membantu menjaga agar penerima tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk, tetapi tidak cukup kuat untuk mengganggu struktur habitus yang telah terbentuk lama. Dengan demikian, penggunaan bantuan dalam kerangka survival justru menjadi salah satu mekanisme yang mereproduksi kemiskinan secara halus dan tidak disadari. Dengan kata lain, kemiskinan tidak direproduksi karena penerima “salah menggunakan” bantuan, melainkan karena bantuan itu masuk ke dalam struktur praktik yang telah dibentuk oleh sejarah panjang keterbatasan. Habitus survival membuat bantuan selalu ditarik ke arah kebutuhan jangka pendek. Oleh karena itu, pola pemanfaatan bantuan sosial dalam kerangka habitus survival menunjukkan batas struktural dari intervensi berbasis transfer tunai. Selama kondisi objektif dan disposisi subjektif penerima tidak berubah secara signifikan, bantuan sosial akan terus berfungsi terutama sebagai alat bertahan hidup, bukan sebagai jembatan menuju keluar dari kemiskinan.

Pengelolaan Bantuan dalam Relasi Keluarga dan Jaringan Sosial

Relasi keluarga dan jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis untuk mengakses bantuan, tetapi juga menjadi ruang di mana makna bantuan itu sendiri dibentuk. Dalam banyak rumah tangga penerima PKH, bantuan tidak dipersepsikan sebagai hak individu, melainkan sebagai sumber daya kolektif yang secara implisit “milik keluarga”. Pola ini terlihat ketika bantuan yang secara administratif atas nama satu orang, misalnya lansia atau ibu rumah tangga akan tetapi pada praktiknya menjadi bagian dari ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Dengan demikian, relasi keluarga berperan sebagai mekanisme distribusi ulang internal atas bantuan sosial. Dalam konteks kemiskinan, mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas praktis. Rumah tangga miskin cenderung tidak memisahkan secara tegas antara uang bantuan, pendapatan harian, dan bentuk dukungan lain. Semua sumber daya dilebur ke dalam satu logika bertahan hidup. Seperti kasus R7 (SM) yang mengelola bantuan sosial ayahnya, tindakan tersebut bukan semata-mata bentuk penguasaan, tetapi juga bagian dari strategi keluarga untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien bagi kelangsungan hidup bersama. Namun, dari sudut pandang struktur, mekanisme ini tetap memperkuat posisi pasif penerima utama.

Disarankan agar pendamping PKH memperkuat pendekatan edukatif dalam kegiatan P2K2, tidak hanya sebagai forum formal, tetapi sebagai ruang refleksi bagi penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme graduasi agar lebih mempertimbangkan aspek sosial dan habitus penerima bantuan.

Relasi seperti ini akan mendorong adanya “delegasi habitus”. Menurut Bourdieu saat habitus penerima yang lemah secara fisik maupun administratif maka akan mendorong mereka untuk menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain yang memiliki modal sosial lebih kuat. Delegasi ini kemudian menjadi pola yang stabil dan berulang. Seiring waktu, penerima tidak lagi mengembangkan kapasitas untuk mengelola sendiri bantuannya, sementara anggota keluarga yang mewakili justru semakin terlatih dalam berurusan dengan birokrasi dan program. Dengan perlahan bantuan sosial secara tidak langsung mereproduksi struktur kuasa kecil di dalam rumah tangga. Selain relasi keluarga, jaringan sosial di komunitas juga menjadi arena penting dalam pengelolaan bantuan. Pertemuan PKH, kelompok lansia, dan aktivitas P2K2 bukan hanya ruang edukasi formal, tetapi juga ruang interaksi sosial. Di ruang inilah penerima saling mengamati, meniru, dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap tuntutan program. Banyak penerima yang belajar kapan harus datang, bagaimana bersikap kepada pendamping, dan bagaimana menunjukkan diri sebagai “penerima yang patuh” melalui interaksi dengan sesama anggota kelompok. Proses ini membentuk norma tidak tertulis tentang bagaimana menjadi penerima bantuan yang “aman”.

Pendamping PKH, R1 (K), melihat bahwa banyak penerima hadir dalam kegiatan bukan karena benar-benar memahami tujuan penguatan kapasitas, tetapi karena takut kehilangan status sebagai penerima. Dalam konteks ini, jaringan sosial berfungsi sebagai mekanisme disipliner yang halus. Penerima saling mengingatkan, mengajak, atau bahkan menekan satu sama lain untuk hadir dan mengikuti kegiatan. Modal sosial bekerja sebagai alat untuk menjaga kepatuhan kolektif terhadap aturan program. Namun, kepatuhan ini bersifat prosedural, bukan substantif. Yang dijaga adalah kehadiran dan formalitas, bukan perubahan orientasi hidup. Pola ini memperlihatkan bahwa pengelolaan bantuan dalam jaringan sosial lebih banyak diarahkan pada stabilitas status sebagai penerima, bukan pada transformasi kondisi hidup. Bantuan sosial diperlakukan sebagai sesuatu yang harus dijaga keberlangsungannya, bukan sebagai modal yang harus dikembangkan. Logika ini sangat konsisten dengan habitus kemiskinan yang terbentuk dari pengalaman hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi di mana masa depan sulit diprediksi, mempertahankan apa yang sudah ada menjadi lebih rasional daripada mengambil risiko untuk perubahan. Dalam relasi keluarga, logika yang sama juga berlaku. Bantuan sering kali digunakan untuk menutup kebutuhan harian, membantu anggota keluarga lain, atau mengisi kekurangan pendapatan rumah tangga. Jarang sekali bantuan diposisikan sebagai modal untuk investasi jangka panjang, seperti pengembangan usaha atau peningkatan keterampilan. Hal ini bukan semata karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena struktur kebutuhan dan relasi sosial mendorong penggunaan bantuan untuk tujuan-tujuan yang paling mendesak. Dengan kata lain, jaringan sosial dan keluarga mengarahkan bantuan ke dalam sirkulasi kebutuhan sehari-hari.

Pola ini menunjukkan bagaimana bantuan sosial diinternalisasi ke dalam sistem relasi sosial yang sudah ada. Negara melalui PKH membawa logika administratif, syarat, dan tujuan perubahan. Namun, ketika masuk ke dalam kehidupan penerima, logika tersebut bertemu dengan habitus dan jaringan sosial yang sudah terbentuk lama. Hasilnya adalah kompromi, saat bantuan diterima dan dikelola tetapi maknanya disesuaikan dengan kebutuhan dan relasi lokal. Proses ini menjelaskan mengapa bantuan sosial sering kali berhasil menjaga kelangsungan hidup, tetapi gagal menghasilkan mobilitas sosial yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan bantuan dalam relasi keluarga dan jaringan sosial bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan proses sosial yang sarat makna. Di dalamnya, bantuan menjadi bagian dari strategi bertahan hidup kolektif, jaringan sosial menjadi

mekanisme stabilisasi, dan habitus kemiskinan menjadi kerangka yang membatasi kemungkinan perubahan. Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa tanpa perubahan pada relasi sosial dan disposisi penerima, intervensi bantuan sosial cenderung diserap ke dalam pola lama dan berkontribusi pada keberlanjutan struktur kemiskinan itu sendiri.

Pengelolaan Bantuan dalam Bingkai Ketergantungan dan Normalisasi Kemiskinan

Bantuan sosial PKH di Kelurahan Sidoharjo tidak hanya berfungsi sebagai intervensi ekonomi, tetapi juga membentuk ruang psikososial baru bagi penerima. Ketika bantuan diterima secara rutin, dengan perlahan bantuan tersebut menjadi bagian dari kalkulasi hidup sehari-hari. Penerima mulai mengatur konsumsi, utang, dan pengeluaran rumah tangga dengan asumsi bahwa bantuan akan tetap ada. Inilah yang oleh Bourdieu dapat dipahami sebagai internalisasi struktur ke dalam disposisi yaitu struktur bantuan negara yang berulang masuk ke dalam habitus dan membentuk ekspektasi serta orientasi tindakan. Pandangan penerima mengenai bantuan adalah sesuatu yang wajar dan permanen ini menunjukkan telah terjadinya Doxa. Dalam perspektif Bourdieu, Doxa adalah suatu skema sosial yang sebenarnya timpang diterima sebagai realitas yang alami dan tidak terbantahkan (*taken-for-granted*). Penerima tidak lagi mempertanyakan mengapa mereka bergantung pada negara, karena bantuan tersebut telah menjadi bagian dari tatanan dunia mereka yang dianggap sudah semestinya demikian. Jika habitus adalah cara mereka bertindak untuk bertahan, maka Doxa adalah alasan di balik tindakan itu, yaitu pandangan bahwa kemiskinan dan bantuan adalah realitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Habitus adalah cara mereka bertindak (strategi bertahan hidup), sedangkan Doxa adalah cara mereka memandang dunia (menganggap miskin itu wajar).

R1 (K) sebagai pendamping menegaskan bahwa meskipun secara formal terdapat batas maksimal lima tahun bagi penerima PKH, dalam praktiknya banyak keluarga yang tidak siap secara mental maupun sosial untuk keluar dari program. Graduasi bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut rasa aman dan stabilitas hidup. Bagi penerima yang sejak lama hidup dalam ketidakpastian ekonomi, keberadaan bantuan memberikan prediktabilitas yang langka. Kehilangan bantuan dipersepsikan bukan sekadar kehilangan uang, tetapi kehilangan jaring pengaman. Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa ketergantungan bukan selalu hasil dari sikap pasif, melainkan dari adaptasi rasional dalam kondisi struktural yang tidak pasti. Dalam masyarakat dengan peluang kerja terbatas, upah rendah, dan risiko ekonomi tinggi, mempertahankan akses terhadap bantuan adalah strategi bertahan hidup yang masuk akal. Namun, ketika strategi ini terulang terus-menerus dan diwariskan sebagai cara hidup yang “paling aman”, ia berubah menjadi habitus yang menghambat mobilitas.

Pengelolaan bantuan sosial di Kelurahan Sidoharjo menjadi arena benturan antara dua ranah (field) dengan logika internal yang berbeda. Ranah PKH adalah ranah negara, yang diatur oleh aturan, indikator, target, dan standar kinerja. Ranah ini membawa logika perubahan, kemandirian, dan mobilitas sosial. Sebaliknya, ranah kehidupan penerima PKH dibentuk oleh habitus kemiskinan yang berkembang melalui pengalaman hidup dalam ketidakpastian ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan relasi ketergantungan. Perbedaan logika ini sangat terlihat jelas dalam cara negara memaknai bantuan sosial. Bagi negara, PKH adalah intervensi sementara yang harus menghasilkan perubahan perilaku dan pada akhirnya graduasi penerima. R1 (K), sebagai pendamping PKH, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat target agar sejumlah penerima dapat keluar dari program melalui skema graduasi. Pada tahun 2025, misalnya, terdapat enam penerima di Kelurahan Sidoharjo yang berhasil graduasi. Namun, ia juga menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada administrasi

atau teknis pendampingan, melainkan pada perubahan mindset penerima. Banyak penerima masih memandang bantuan sosial sebagai sesuatu yang wajar dan berkelanjutan, bukan sebagai fasilitas sementara. Di sisi lain, bagi penerima PKH, bantuan sosial dipahami dalam logika yang sangat berbeda. Bantuan tidak dibaca sebagai “modal transformasi”, melainkan sebagai penyangga hidup. Dalam kondisi ekonomi yang rapuh, bantuan menjadi sumber kepastian yang sangat berharga. Karena itu, orientasi utama penerima bukanlah keluar dari program, tetapi memastikan tetap berada di dalamnya.

Kehadiran dalam P2K2, kepatuhan administratif, dan pemenuhan kewajiban program sering kali dilakukan bukan karena internalisasi nilai kemandirian, melainkan sebagai strategi untuk mempertahankan status sebagai penerima. Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai kepatuhan simbolik. Penerima mengikuti aturan secara minimal agar tidak kehilangan bantuan, tetapi tanpa perubahan disposisi yang mendalam. Negara menilai keberhasilan dari indikator formal, seperti kehadiran, laporan, status kepesertaan, sementara penerima menilai keberhasilan dari apakah bantuan tetap cair dan cukup untuk menopang kebutuhan hidup. Kedua pihak sama-sama bertindak rasional, tetapi dalam logika yang berbeda. Ketegangan ini juga terlihat dalam kebijakan batas waktu penerimaan bantuan, adanya aturan secara normatif tentang batas maksimal namun di lapangan, banyak penerima telah menerima bantuan jauh lebih lama. Dalam kerangka Bourdieu, mereka tidak memiliki cukup modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial produktif untuk mengubah posisi mereka dalam struktur sosial. Akibatnya, bantuan sosial yang dirancang sebagai alat mobilitas justru terserap ke dalam habitus survival. Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, menjaga kesehatan minimum, dan mempertahankan stabilitas hidup. Logika negara yang menuntut perubahan bertemu dengan logika penerima yang menuntut keberlangsungan. Di titik ini, bantuan sosial tidak gagal, tetapi mengalami redefinisi fungsi yaitu dari alat transformasi menjadi alat stabilisasi.

Ketegangan ini menjelaskan mengapa reproduksi kemiskinan tetap berlangsung meskipun ada intervensi negara. Negara bekerja pada tingkat kebijakan dan aturan, sementara kemiskinan direproduksi pada tingkat praktik sehari-hari. Selama habitus kemiskinan tidak berubah dan selama orientasi hidup tetap pada hari ini dan bukan masa depan maka bantuan sosial akan terus masuk ke dalam siklus yang sama yaitu untuk membantu bertahan, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah struktur peluang. Dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada niat negara atau moral penerima, melainkan pada ketidaksesuaian antara struktur intervensi dan struktur disposisi. Bourdieu mengingatkan bahwa perubahan sosial mensyaratkan perubahan pada struktur dan disposisi sekaligus. Selama akumulasi modal budaya, ekonomi, dan sosial produktif belum terjadi, maka habitus kemiskinan akan tetap dominan dan terus mereproduksi dirinya. Kondisi ini akhirnya akan melanggengkan Doxa kemiskinan, di mana lingkaran ketergantungan bantuan tidak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai kewajiban hidup yang melumpuhkan imajinasi untuk mobilitas sosial. Sedangkan bantuan sosial akan lebih berfungsi sebagai penyangga hidup daripada sebagai alat perubahan nasib.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu, dapat disimpulkan bahwa pola habitus kemiskinan berpengaruh kuat terhadap pengelolaan bantuan PKH di Kelurahan Sidharjo. Bantuan cenderung digunakan untuk kebutuhan jangka pendek karena

terbentuknya orientasi berpikir praktis dan bertahan hidup, sehingga belum dimaknai sebagai sarana menuju kemandirian ekonomi. PKH telah terinternalisasi sebagai bagian dari struktur hidup rumah tangga, di mana pengeluaran dan konsumsi disesuaikan dengan jadwal pencairan bantuan. Kondisi ini memperkuat ketergantungan rasional terhadap bantuan. Selain itu, muncul normalisasi status miskin (*doxa*) yang membuat kondisi sebagai penerima bantuan dianggap wajar, sehingga dorongan untuk keluar dari kemiskinan menjadi lemah. Dalam praktiknya, kegiatan P2K2 lebih mencerminkan kepatuhan simbolik untuk mempertahankan status sebagai penerima bantuan, bukan sebagai sarana perubahan perilaku ekonomi. Sementara itu, modal sosial yang kuat hanya berfungsi sebagai penyangga ekonomi, bukan sebagai pendorong mobilitas keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan edukatif dalam P2K2 serta evaluasi mekanisme graduasi yang lebih mempertimbangkan aspek sosial dan habitus penerima bantuan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. In *The new social theory reader* (pp. 80–86). Routledge.
- Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. (2024a). *DTKS Pacitan Capai 288.448 Individu, Penurunan Persentase Penduduk Miskin Terus Berlanjut*. <https://timesindonesia.co.id/tag/Dinsos-Kabupaten-Pacitan>
- Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. (2024b). *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menurut Kecamatan Dinas Sosial*. https://data.pacitankab.go.id/search/detail?data_id=1.06.0063&ryear=2023-2025
- Haliim, W., & Purba, D. (2023). Social and bureaucratic problems in social policy implementation in Indonesia: A study on the Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1).
- Husserl, E., & Moran, D. (1931). *Ideas: General introduction to pure phenomenology*. Routledge.
- Kementerian Sosial. (2016). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kencana Prenada Media Group*. Jakarta.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.
- Magna, M. S., & Karisma, S. (2025). Social Assistance Recipient Program Based on Lawrence M. Friedman's Theory. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2982–2990.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (1984). *Qualitative Data Analysis* (4th ed.). Amerika: SAGE Publications.
- Nurofik, I., Kolopaking, L. M., & Hartoyo, S. (2022). Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 10(7), 570–587.
- Pemerintah Indonesia Pusat. (2015). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: Pemerintah Pusat Indonesia.